



SATIN – Sains dan Teknologi Informasi

journal homepage : <http://jurnal.stmik-amik-riau.ac.id>



Aplikasi Keuangan Desa dalam Perencanaan Anggaran Kegiatan

Dilson

Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh
dilsonpyk2013@gmail.com

Lilik Suherly

Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh
lilik_suheri@gmail.com

Abstrak

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satunya adalah desa diberikan kesempatan untuk mengelola keuangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan penelitian adalah untuk merancang aplikasi Perencanaan Keuangan Desa (Alokasi Dana Desa) pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi. Metode penelitian menggunakan metode pengembangan sistem Design Science Research Method (DSRM) yang terdiri dari 6 (enam) tahapan mencakup tahap Identifikasi Masalah dan Motivasi, Mendefinisikan Obyek dari Solusi Permasalahan, Design dan Pengembangan, Demonstrasi (implementasi), Evaluasi dan Komunikasi. Analisa dan perancangan aplikasi divisualisasikan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Perancangan interface aplikasi berbasis .Net Framework 4.5, perancangan database menggunakan MySQL, dan untuk pembuatan laporan menggunakan SAP Crystal Report. Hasil penelitian dapat mempermudah Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Desa (PTKD) dalam membuat Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB Desa). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan aplikasi perencanaan keuangan desa khususnya pada perubahan RKA Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan baik berbasis desktop, web maupun aplikasi mobile.

Keyword : Aplikasi, Alokasi Dana Desa, Perencanaan Keuangan, UML

1. Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. (BPKP, 2015).

UU No. 6 Tahun 2014 memberikan arah pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). Transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam hal pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. (A. Riyanto, 2016)

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Mahfudz, 2009).

Alokasi Dana Desa berdasarkan rincian penggunaannya adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintahan desa. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Kusuma Putra & Nur Pratiwi, 2013).

Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa baik secara kuantitas maupun kualitas dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (BPKP, 2015).

Dalam perencanaan keuangan, pelaksana teknis keuangan kesulitan menyusun RKPDesa yang memuat jenis kegiatan, jumlah dan sumber pembiayaan yang dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, disamping itu pelaksana kegiatan kesulitan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang harus dilampirkan.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh pemerintahan desa adalah belum adanya prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh sebab itu pemerintahan desa harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. (Widagdo, Widodo, & Ismail, 2016). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. (Lestari, 2014)

Tujuan penelitian adalah merancang sebuah aplikasi perencanaan keuangan desa yang dapat membantu Pelaksana Teknis Keuangan (PTK) khususnya bidang pelaksana kegiatan pembangunan dalam membuat rencana kegiatan pembangunan (RKP) dan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (RAPB Desa) dengan mudah sehingga RKP dan RAPB Desa tersebut dapat dijadikan pedoman dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksana kegiatan pembangunan.

2. Kajian Literatur

2.1. Aplikasi

Menurut Supriyanto (2005 : 117) Aplikasi adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Janner (2006 : 22) aplikasi adalah program atau sekelompok program yang dirancang untuk digunakan oleh pengguna akhir (*end user*). (Yogyakarta & Rizkiansyah, 2009)

2.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (PP No. 72 Th. 2005 pasal 1 ayat 11). ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi. (Florensi, 2014)

Penggunaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan keuangan desa, maka seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat untuk meningkatkan sarana dan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang di putuskan dalam musyawarah desa. (T. Riyanto, 2015)

2.3. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. (BPKP, 2015)

2.4. Unified Model Language

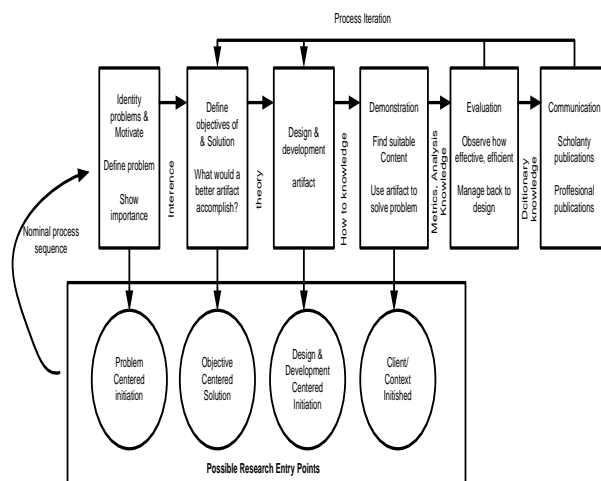
UML dalam sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan *artifacts* dari sistem *software*, untuk memodelkan bisnis, dan sistem *non-software* lainnya. UML merupakan sistem arsitektur yang bekerja dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, visualisasi, konstruksi dan mendokumentasikan *artifact* yang terdapat dalam sistem. *Artifact* adalah sepotong informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses rekayasa *software*. *Artifact* dapat berupa model, deskripsi atau *software*. (Herdiansyah, Afrianto, & Bandung, 2013)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode *Design Science Research Method* (DSRM) yang terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan, demonstrasi, evaluasi dan komunikasi. (Dilson & Lilik, 2016)

3.1. Kerangka kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian metode DSRM seperti terlihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Kerangka kerja penelitian

Gambar 1 menjelaskan kerangka kerja penelitian yang terdiri dari :

a. Identifikasi masalah

Tahap identifikasi masalah adalah tahapan awal penelitian yang dilakukan untuk menemukan permasalahan tentang perencanaan keuangan desa.

b. Menentukan Solusi Permasalahan

Tahap selanjutnya adalah memberikan solusi serta masukan kepada aparatur pemerintahan desa tentang kemudahan yang diperoleh dari aplikasi perencanaan keuangan desa yang akan dikembangkan

c. Perancangan dan pengembangan

Tahap perancangan dan pengembangan adalah melakukan analisa sistem menggunakan UML, perancangan input menggunakan Visual Studio Net, perancangan output menggunakan SAP Crystal Report, dan perancangan database menggunakan MySQL.

d. Demonstrasi

Tahap demonstrasi adalah tahapan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan uji coba aplikasi sebelum diterapkan pada kantor Wali Nagari Durian Tinggi menggunakan *black box system*, dan penyebaran kuisioner kepada Pelaksana Teknis Keuangan Desa untuk mendapatkan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang digunakan khususnya dalam merencanakan keuangan desa.

e. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, kegiatan yang dilakukan adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan program sesuai dengan saran dan kebutuhan pengguna aplikasi. Kuisioner yang disebarkan diolah untuk mendapatkan persentase kepuasan pengguna.

f. Komunikasi

Tahap komunikasi adalah tahapan akhir penelitian, yaitu luaran penelitian yang disebarkan ke komunitas akademisi berupa jurnal, prosiding maupun produk.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota, dengan Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris sebagai objek penelitiannya.

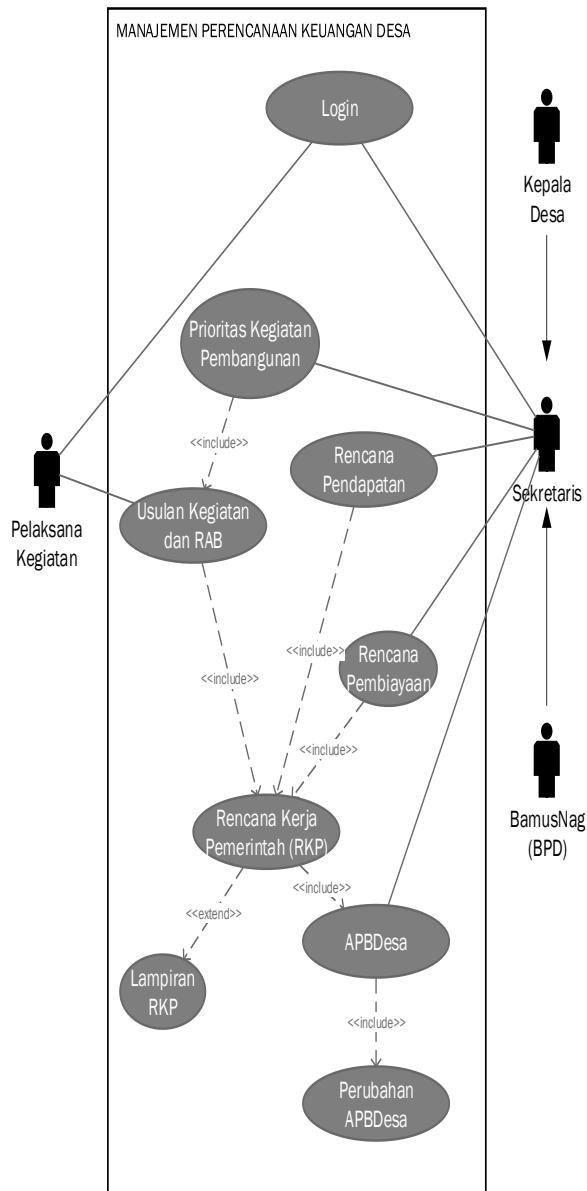
3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan penelitian berupa literatur tentang pedoman dan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang, serta data yang diperoleh dari hasil survey lapangan pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi berupa dokumen Peraturan Wali Nagari dan arsip perencanaan keuangan Nagari, yaitu Rencana Kerja Pembangunan (RKP), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan RAPB Nagari.

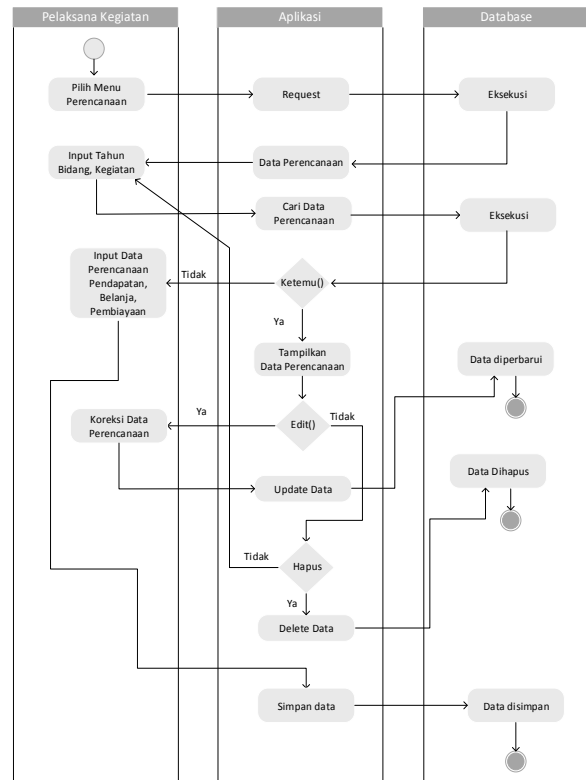
Tool atau alat yang digunakan dalam analisa sistem menggunakan model *Unified Model Language* (UML) yang terdiri dari *class diagram*, *use case diagram*, *sequential diagram*, dan *activity diagram*. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan sistem adalah Microsoft Visual Studio 2012, *Crystal Report* dan perancangan database menggunakan *MySql*.

3.4. Analisa Sistem

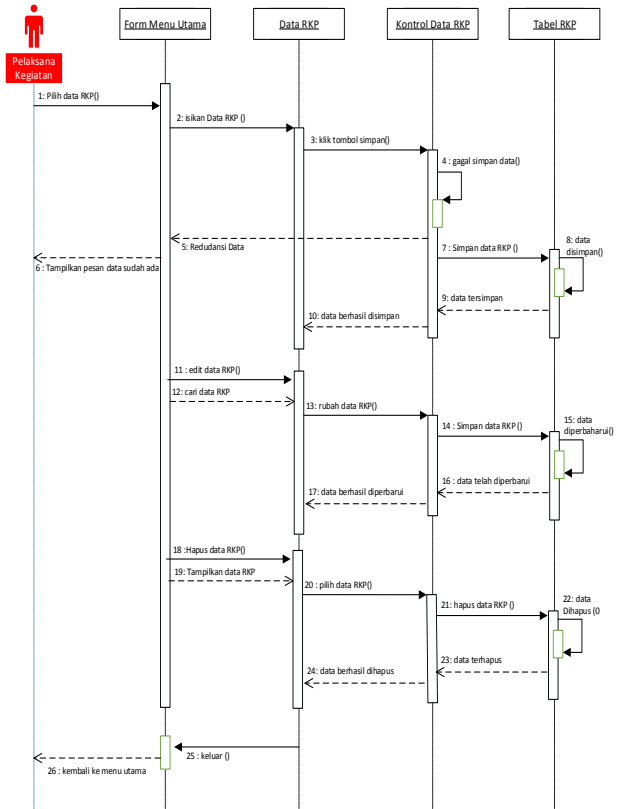
Teknik yang digunakan dalam analisa sistem menggunakan model *Unified Model Language* (UML) yang terdiri dari *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram* dan *class diagram* seperti terlihat pada gambar 2,3,4, dan 5 berikut :



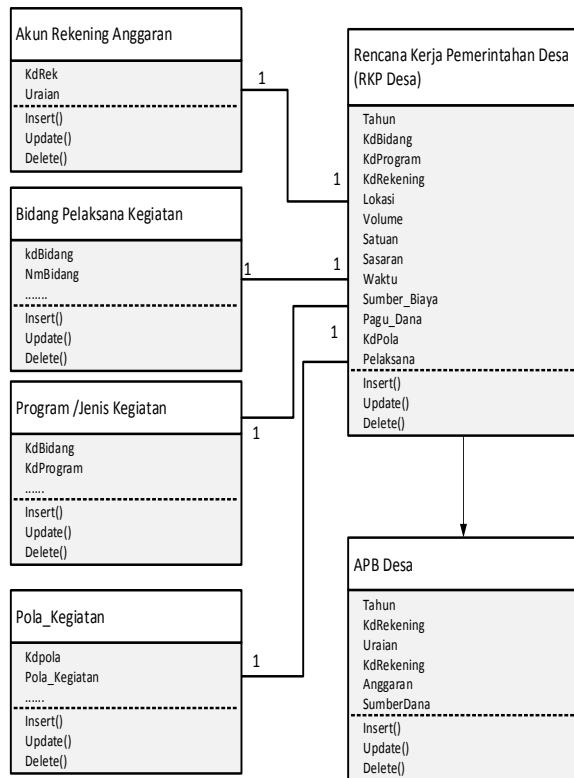
Gambar 2. Use case diagram



Gambar 3. Activity diagram



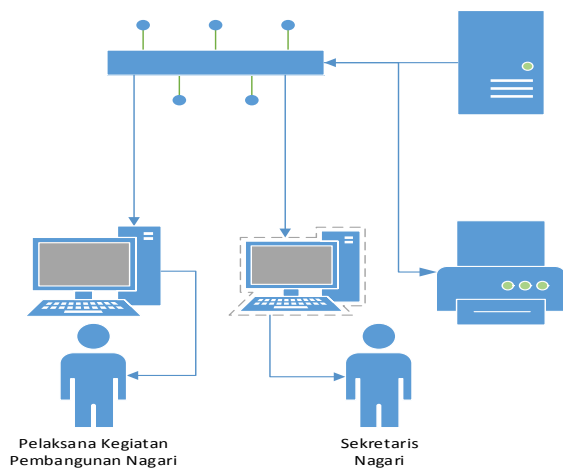
Gambar 4. Sequence diagram



Gambar 5. Class diagram

3.5. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam penelitian terdiri dari perancangan arsitektur jaringan aplikasi berbasis client server, perancangan input Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pendapatan, input RKA Belanja, input RKA Pembiayaan, Ouput RKP Desa, dan Output laporan APB Desa seperti terlihat pada gambar 6,7,8,9 dan gambar 10 berikut :



Gambar 6. Arsitektur jaringan

Gambar 7. Rancangan input RKA pendapatan

Gambar 8. Rancangan input RKA belanja

Gambar 9. Rancangan input RKA Pembiayaan

Gambar 10. Rancangan output RKP Desa

Gambar 11. Rancangan output APB Desa

3.6. Perancangan Kuisioner Kepuasan

Kuisioner kepuasan pengguna aplikasi digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan user terhadap aplikasi perencanaan keuangan yang dikembangkan. Bentuk rancangan kuisioner kepuasan pengguna aplikasi perencanaan alokasi dana desa seperti terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel.1. Rancangan kuisioner kepuasan pengguna

KUISIONER APLIKASI PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA	
IDENTITAS	
1. Nama	:
2. Jenis Kelamin	:
3. Jabatan	:
4. Pendidikan Terakhir:	:
5. Ho.HP	:
6. E-mail	:

KUISIONER KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI ALOKASI DANA DESA

Pertanyaan-pernyataan dibawah ini berkaitan dengan persepsi Bapak/Ibu terhadap Aplikasi Alokasi Dana Desa yang digunakan. Mohon pilih dan centang [☐], nomor yang

Bapak/Ibu anggap paling tepat mencerminkan persepsi Bapak/Ibu.

Arti penilaian:

4=sangat setuju 3= setuju, 2=kurang setuju, 1=tidak setuju

No	Penilaian	Standar Penilaian			
		1	2	3	4

A. Kelengkapan Isi (Content)

- 1 Informasi yang dihasilkan sesuai dengan transaksi pengeluaran/ belanja Alokasi Dana Desa?
- 2 Laporan yang dihasilkan tepat seperti yang di butuhkan?
- 3 Aplikasi yang digunakan menghasilkan informasi yang cukup?.

B Keakuratan (Accuracy)

- 4 Data/ informasi yang dihasilkan lebih akurat?
- 5 Data/Informasi yang dihasilkan sesuai dengan format Alokasi Dana Desa?

C Tampilan (Performance)

- 6 Apakah aplikasi yang digunakan mengganggu kelancaran aplikasi lainnya?
- 7 Aplikasi yang digunakan dapat dipahami secara jelas.?

D Kemudahan (Ease of use)

- 8 Mudah digunakan (User friendly)?
- 9 Apakah aplikasi dapat menghasilkan laporan secara tepat waktu?
- 10 Apakah informasi yang dihasilkan cukup relevan ?

Kesan :

Saran :

9999	Durian Tinggi, 99-xxxxxxx-
	Pengisi Kuisioner,
	TTD

Nama Lengkap

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner dilakukan dengan cara menentukan skor jawaban menggunakan skala likert, menentukan skor tertinggi dengan rumus :

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = \text{jumlah validator} \times \text{jumlah indikator} \times \text{skor maksimal.}$$

Menentukan jumlah skor dari masing-masing responden dengan menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator, dan

menentukan nilai validitas dilakukan dengan menggunakan rumus kriteria validasi seperti tabel 2.

Tabel 2. Kriteria validasi

Kriteria	Rentangan Persentase (%)
Sangat valid	81 - 100
Valid	61 - 80
Cukup valid	41 - 60
Kurang valid	21 - 40
Tidak valid	0 - 20

Sumber: Dimodifikasi dari (Riduwan, 2011:89)

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Nilai akhir

F = Perolehan skor

N = Skor maksimum

3.8. Teknik Pengujian Sistem

Teknik pengujian sistem menggunakan *Black Box Testing* yang fokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. *Black Box Testing* merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh *White Box Testing*. (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2015). Pengujian *black box* penelitian dilakukan pada modul login, menu utama, form isian RKA Pendapatan, RKA Belanja, RKA Pembiayaan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian adalah aplikasi perencanaan keuangan yang terdiri dari beberapa form input, output /laporan, pengukuran hasil validasi kuisioner kepuasan pengguna aplikasi dan hasil *black box testing*.

a. RKA pendapatan

Form RKA pendapatan merupakan form yang digunakan untuk mengisi rencana kegiatan anggaran pendatan seperti terlihat pada gambar 12.

Gambar 12. Form isian RKA pendapatan

Gambar 12 form isian RKA pendapatan menunjukkan bahwa total rencana kegiatan anggaran pada tahun 2017 pada kelompok rekening Pendapatan Asli Daerah, jenis kegiatan Hasil usaha yang terdiri dari 4 (empat) item pendapatan yang terdiri dari 5 unit Usaha Keripik Jagung berjumlah Rp. 25.000.000, 10 unit usaha tenun rotan berjumlah Rp. 12.500.000, 10 kelompok tani gambar berjumlah Rp. 125.000.000, dan pendapatan usaha kebun kopi berjumlah Rp. 65.000.000 dengan total pagu dana pendapatan berjumlah 227. 500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. RKA Belanja

Form RKA belanja merupakan form yang digunakan untuk mengisi rencana kegiatan anggaran belanja seperti terlihat pada gambar 13.

Gambar 13. Form isian RKA belanja

Gambar 13 menunjukkan RKA Belanja pada tahun 2017 yang direncanakan Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa untuk kegiatan Pengadaan Sarana TIK, Komputer/Laptop/LCD Projector dengan pagu dana

54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk kelompok belanja Pegawai terpakai sejumlah 7.600.000 untuk pembelian Laptop Merk ASUS Core i7, 1TB, 4GB.

c. RKA Pembiayaan

Form RKA pembiayaan merupakan form yang digunakan untuk mengisikan rencana kegiatan pembiayaan seperti terlihat pada gambar 14.

Gambar 14. Form isian RKA pembiayaan

Gambar 14 menunjukkan RKA pembiayaan pada tahun 2017 pada kelompok rekening Penerimaan Pembiayaan dan jenis kegiatan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan yang terdiri dari 3 (tiga) item pembiayaan yaitu SILPA Tahun Lalu berjumlah Rp. 25.000.000, Cadangan Tahun Lalu berjumlah Rp. 15.000.000, dan penjualan 1 Kapling Sawah Kering Rp. 56.750.000 dengan total pembiayaan Rp. 96. 750.000.

d. Laporan RKP Desa

Output RKP Desa merupakan laporan Rencana Kerja Pemerintahan desa sesuai dengan rencana kerja anggaran yang diajukan oleh masing-masing unit PTK, seperti terlihat pada gambar 15 berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)									
TAHUN ANGGARAN 2000X									
Desa : Durian Tinggi		Kecamatan : Kapur IX		Kabupaten/Kota : Lima Puluh Kota		Provinsi : Sumatera Barat		Bidang : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Mfaat	Validasi Pelaksanaan	Bidang dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan	
						Jumlah Rp.	Sumber	Selektif	Rencana Pelaksanaan
1	Asumsi BPS dan Anggaran	Durian Tinggi	1 Tahun	Terdapat Kemajuan dan Kerja	2017	30.000.000,00	3 tahun Anggaran Kabupaten Kota	V	Valid
2	Pengadaan Sarana TIK, Komputer, Laptop, LCD, Projector	Durian Tinggi	1 Tahun	Meningkatkan Prestasi Kerja	2017	54.000.000,00	3 tahun Anggaran Kabupaten Kota	V	Valid

Gambar 15. Laporan RKP desa

Gambar 15 menunjukkan laporan RKP Desa Durian Tinggi tahun 2014 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 30.000.000 dan Pengadaan Sarana TIK/Computer/Laptop/LCD Projector sebesar Rp. 54.000.000 sesuai dengan form isian RKA Belanja.

e. Laporan APB Desa

Output APB Desa merupakan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pemerintahan Durian Tinggi tahun anggaran 2017 seperti terlihat pada gambar 16 berikut :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN NAGARI DURIAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2017			
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Rp.	Keterangan
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	227.500.000,00	
4.01	Pendapatan Asli Daerah		
4.01.01	Hasil Usaha		
4.01.01.01	Usaha Keripik Jagung	25.000.000,00	
4.01.01.02	Usaha Temun Rotan	12.500.000,00	
4.01.01.03	Kebun Gambir	125.000.000,00	
4.01.01.04	Kebun Kopi	65.000.000,00	
	JUMLAH Rp.	227.500.000,00	
5	PEMBIAYAAN	96.750.000,00	
5.01	Penerimaan Pembiayaan		
5.01.01	SILPA		
5.01.01.01	SILPA Tahun Lalu	25.000.000,00	
5.01.02	Pencairan Dana Cadangan		
5.01.02.01	Cadangan tahun lalu	15.000.000,00	
5.01.03	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan		
5.01.03.01	Penjualan 1 Kapling Sawah Kering	56.750.000,00	
	JUMLAH Rp.	96.750.000,00	

DURIAN TINGGI, 30 Oktober 2017
WALI NAGARI DURIAN TINGGI

Gambar 16. Laporan APB desa

Gambar 16 menunjukkan laporan APB Desa Durian Tinggi Tahun Anggaran 2017 yang berisikan anggaran pada rekening pendapatan dengan pagu data sebesar Rp. 227.500.000 sesuai dengan data yang diisikan pada form isian RKA Pendapatan. Sedangkan pada rekening Pembiayaan terlihat total pagu dana yang dianggarkan sebesar Rp. 96.750.000 sesuai dengan data yang diisikan pada form isian RKA Pembiayaan.

f. Validasi Kepuasan Pengguna

Berdasarkan kuisioner yang disebarikan kepada 3 orang PTK yang menggunakan aplikasi perencanaan keuangan desa, maka didapat nilai validasi kepuasan pengguna seperti terlihat pada tabel 3 berikut :

Tabel.3. Nilai Validasi Kepuasan Pengguna

No	Kriteria	R1	R2	R3	Skor	Nilai Validasi (%)	Kategori
A.Content							
	A.1	4	4	4	12	100	SV
	A.2	4	4	3	11	91.6	SV
	A.3	4	4	4	12	100	SV

B.Accuracy						
B.4	4	4	4	12	100	SV
B.5	4	3	3	10	83.3	SV
C.Performance						
C.6	4	3	3	10	83.3	SV
C.7	4	3	4	11	91.6	SV
D.Ease of use						
D.8	3	4	3	10	83.3	SV
D.9	4	4	4	12	100	SV
D.10	3	4	4	11	83.3	SV
Jumlah	38	37	36	111	916.4	
Validasi	95	92.5	90		92.5	SV

Tabel 3 melihatkan hasil skor rata-rata yang diperoleh dari 3 (tiga) orang responden dengan 4 (empat) indikator A (content), B (Accuracy), C (Performance), dan D (Ease of use) yang terdiri dari 10 kriteria menunjukan kategori penilaian sangat valid (SV), artinya semua operator yang menjalankan aplikasi menyatakan sangat puas dan aplikasi ini sangat membantu pekerjaan PTK dalam perencanaan keuangan khususnya Alokasi Dana Desa.

g. Black Box Testing

Berdasarkan hasil pengujian secara *black box testing* pada setiap modul yang terdapat pada aplikasi perencanaan keuangan desa, menghasilkan data 100% valid seperti terlihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Hasil pengujian Blackbox

Komponen	Hasil
Modul Login	Valid
Modul RKA Pendapatan	Valid
Modul RKA Belanja	Valid
Modul RKA Pembiayaan	Valid
Modul Laporan RKP Desa	Valid
Modul Laporan APB Desa	Valid

Tabel 4 menunjukan hasil pengujian aplikasi secara *black box testing* pada modul login, RKA Pendapatan, RKA Belanja, RKA Pembiayaan, Laporan RKP, dan Laporan APB Desa menunjukan hasil pengujian bernilai Valid.

5. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

- Aplikasi yang dirancang dapat digunakan oleh PTK untuk mengisi data RKA Pendapatan, RKA Belanja, dan RKA Pembiayaan.

- Laporan yang dihasilkan (RKP Desa dan APB Desa) lebih akurat dan sesuai dengan data yang diisikan pada form RKA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Sebelum aplikasi diterapkan terlebih dahulu dilakukan pengujian secara *black box testing*. Dan hasil pengujian menunjukan bahwa modul yang dijalankan tidak terdapat kesalahan (valid).
- Setelah dilakukan penerapan aplikasi pada operator yang menjalankan aplikasi, berdasarkan validasi kuisioner hasil survey terhadap kepuasan pengguna maka didapat nilai rata-rata validitas kepuasan pengguna diatas 80% artinya sangat puas.

6. Saran

Aplikasi perencanaan keuangan Alokasi Dana Desa masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan pemerintahan desa dalam perencanaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun saran-saran terhadap pengembangan aplikasi ini untuk kedepannya adalah sebagai berikut :

- Sebaiknya pengisian data rencana anggaran kegiatan mengacu pada prioritas kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.
- Adanya fitur perubahan RKA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sehingga lebih mudah membuat laporan perubahan APB Desa.
- Terintegrasinya aplikasi perencanaan keuangan dengan sistem anjungan informasi desa, agar Informasi Grafik dapat menampilkan jumlah pendapatan keuangan desa, dan diketahui oleh masyarakat secara transparan.
- Agar pekerjaan lebih terorganisasi, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap bidang/operator yang akan menjalankan aplikasi perencanaan Alokasi Dana Desa.

7. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada RISTEK DIKTI yang telah memberikan bantuan Dana penelitian pada SKIM Penelitian Dosen Pemula Tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Nomor : 111/SP2H/PPM/DRPM/11/2016, tanggal 17 Februari 2016. Tidak lupa pula ucapan terimakasih atas kerjasama lembaga Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh, Aparatur Pemerintahan Nagari Durian Tinggi yang telah bersedia memberikan data dan

informasi selama penelitian berlangsung, serta Tim yang terlibat selama penelitian berlangsung.

8. Referensi

- BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*, 40–49.
- Dilson & Lilik. (2016). SATIN – Sains dan Teknologi Informasi Penilaian Aspek Pengetahuan Kurikulum 2013. *SATIN*, 2 NO 2, 83–89.
- Florensi, H. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–8.
- Herdiansyah, M. Y., Afrianto, I., & Bandung, J. D. (2013). PEMBANGUNAN APLIKASI BANTU DALAM MENGHAFAZ AL- QUR ' AN BERBASIS MOBILE Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA). *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)*, 2(2).
- Kusuma Putra, C., & Nur Pratiwi, R. (2013). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Lestari, A. D. M. P. A. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol 2(No.1).
- Mahfudz. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1), 10–22.
- Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). PENGUJIAN APLIKASI MENGGUNAKAN BLACK BOX TESTING BOUNDARY VALUE ANALYSIS (Studi Kasus: Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN). *JITTER*, 1(3), 31–36.
- Riyanto, A. (2016). AKUTANSI DALAM PERSPEKTIF DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *SNIPTEK*, 444–450.
- Riyanto, T. (2015). AKUNTABILITAS FINANSIAL DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KANTOR DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *eJournal Administrasi Negara*, 3 No 1(1), 119–130.
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Yogyakarta, E., & Rizkiansyah, I. (2009). BERMAIN PIANO BERBASIS MULTIMEDIADI LEMBAGA KURSUS MUSIK Media pembelajaran memegang peranan penting dalam proses pembelajaran . Menurut Latuheru (1988 : 11), bahwa media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau .